



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 166/HUMAS PMK/VI/2023

Menko PMK: Gerakkan UMKM, Entaskan Ketimpangan Ekonomi

*Meriah, Bazar Blitar Jadoel 2023 Dibanjiri Warga

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai pemerata perekonomian bangsa. Menurutnya, dengan menggerakkan UMKM maka ketimpangan ekonomi di Indonesia bisa diatasi.

Dalam hal ini, Muhadjir menyebut, dengan menggerakkan UMKM yang mayoritas warga Indonesia adalah pelaku usaha kecil, dan mendedukasi masyarakat supaya membeli produk-produk lokal, maka geliat ekonomi nasional akan terus bertumbuh. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi bisa dicapai.

Menko Muhadjir menyampaikan, saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data BPS September 2022 , angka kemiskinan sebesar 9,57 persen. Kemudian, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar 1,74 persen. Kemudian, kata dia, menjadi miris ketika realitanya beberapa orang Indonesia justru bisa masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia.

Permasalahan itulah yang menurut Menko Muhadjir harus bisa diselesaikan dengan menggerakkan UMKM dan menciptakan keadilan sosial ekonomi. Demikian disampaikan Menko Muhadjir saat membuka kegiatan Bazar Blitar Djadoel 2023, di Aloon-Aloon Kota Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (17/6/2023).

"Tingkat ketimpangan kita masih tinggi dan kalau cita-cita keadilan sosial mau tercapai harus gerakkan UMKM. Kalau belanja jangan cari hanya yang bermerek apalagi dari impor. Belanjalah dari pengrajin lokal kreator blitar. Dengan begitu maka distribusi kekayaan bisa berputar di kita semua. Bukan hanya di mereka yang kaya," ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir mengatakan, Kota Blitar dengan julukannya sebagai Kota Bung Karno punya tanggung jawab untuk mengejawantahkan cita-cita luhur Presiden RI ke-1 itu dalam mewujudkan Indonesia makmur dan keadilan sosial.

"Sebagai kota yang mengklaim Kota Bung Karno, Blitar punya tanggung jawab merealisasi itu. Melalui kegiatan Bazar Blitar Djadoel, tiga daulat Bung Karno, yaitu daulat politik, mandiri ekonomi, dan berbudaya dalam kepribadian harus bisa diimplementasi. Oleh sebab itu teruskan apa yang sudah dirintis, yang sudah dimulai, yang sudah terjadi berkat kreativitas warganya dan dorongan pemerintahnya harus terus ditunjukkan," jelasnya.

Dalam acara pembukaan Bazar Blitar Djadoel, hadir Walikota Blitar Santoso, Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono, Ketua DPRD, jajaran Forkopimda, OPD dan masyarakat kota Blitar. Di kesempatan itu juga Menko Muhadjir disuguhi sajian sendratari Tari Barong Kucingan, Tari Ceping, dan nyanyian serta sajian budaya khas Blitar.

Menurut Menko Muhadjir, kota Blitar dalam sisi pembinaan kebudayaan bidang kesenian levelnya sudah level nasional. Karena itu, menurut Menko Muhadjir berbagai macam performance kreatif ini harus sering ditampilkan di luar kota seperti di Jakarta.

"Ini tidak mudah karena tidak semua bisa mendesain budayanya sebagus kota Blitar. Mendesain fisik relatif gampang. Mendesain budaya sebagai bagian amanat trisakti Bung Karno itu tidak mudah," ucapnya.

Seperti diketahui, Bazar Blitar Djadoel akan diselenggarakan pada 17 - 21 Juni 2023 yang juga bertepatan dengan bulannya Bung Karno. Menko Muhadjir juga melakukan penabuhan Kendang Sentul dan penguntingan pita tanda membuka acara Bazar Blitar Djadoel 2023.

Kemudian, Menko Muhadjir juga melakukan tradisi seperti tampah beras, mencanting kain, dan mengaduk jenang. Ditemani khalayak ramai dan masyarakat yang meriah memadati pembukaan bazar, Menko Muhadjir juga mengunjungi satu per satu stan UMKM yang menggelar lapak di Aloon-Aloon Kota Blitar. Dia juga memborong produk kreatif lokal kaos dengan motif Ir. Soekarno produk dari Chakrawangsa, dan memborong beberapa kain batik khas Blitar.

"Ini harus kita dorong, industri UMKM dan produk kreatif harus dikuatkan untuk bisa meningkatkan ekonomi Indonesia di masa pemulihan ekonomi. Tidak hanya andalkan perusahaan besar, karena 80 persen ada pelaku UMKM. Karena itu harus didorong agar roda ekonomi lancar," pungkasnya. (*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**